

# ALUTSISTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA PERIODE 1959-1969

**Ridwan Maulana, Djuanaidi, Sri Martini**

Universitas Negeri Jakarta

[ridwanmaulanasejarahb@gmail.com](mailto:ridwanmaulanasejarahb@gmail.com)

**Abstract :** RIDWAN MAULANA ALUTSISTA OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA PERIOD 1959-1969. *History Education Study Program, Faculty of Social Sciences, Jakarta State University, 2024. The aim of this research is to determine the procurement and use of defense equipment from 1959 to 1969. The research method used in this research is a historical research method with a narrative descriptive model which consists of four stages, namely: heuristics, criticism, interpretation and historiography. The research results show that the development of defense equipment for the Indonesian Armed Forces is very much influenced by political dynamics both at home and abroad. Prior to the West Irian Liberation Campaign, defense equipment procurement had not been carried out on a large scale and tended to be purchased from Western European or Western Block countries. However, entering the West Irian Liberation Campaign, Indonesia shifted to choosing Eastern European or Eastern Bloc countries as the main producers in obtaining defense equipment. Throughout the mid-1960s, the Indonesian military was very dependent on the Eastern Bloc. After the G-30S/PKI incident, there were changes in domestic politics which caused a strain in Indonesia's relations with the Eastern Bloc countries, affecting the readiness of defense equipment, especially for the Air Force and Navy. Thus, many defense equipment were forced to be retired early.*

**Keyword :** *Procurement of Defense Equipment, Use of Defense Equipment, Indonesian Armed Forces.*

**Abstrak :** RIDWAN MAULANA ALUTSISTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA PERIODE 1959-1969. Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2024. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengadaan dan penggunaan Alutsista dari tahun 1959 hingga 1969. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan model deskriptif naratif yang terdiri dari empat tahapan, yakni: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian diketahui bahwa bahwa perkembangan alutsista bagi Angkatan Bersenjata Indonesia sangat dipenuhi oleh dinamika politik baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sebelum terjadinya Kampanye Pembebasan Irian Barat, pengadaan alutsista belum dilakukan secara besar-besaran dan cenderung membeli dari negara-negara Eropa Barat atau Blok Barat. Namun memasuki Kampanye Pembebasan Irian Barat, Indonesia bergeser memilih negara-negara Eropa Timur atau Blok Timur menjadi produsen utama dalam mendapatkan alutsista. Sepanjang pertengahan tahun 1960-an, militer Indonesia sangat bergantung kepada Blok Timur. Setelah terjadinya peristiwa G-30S/PKI, terjadi perubahan dalam politik dalam negeri yang menyebabkan

merenggangnya hubungan Indonesia dengan negara-negara Blok Timur, mempengaruhi kesiapan alutsista terutama bagi Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Sehingga, banyak alutsista yang terpaksa dipensiunkan secara dini.

**Kata Kunci :** Pengadaan Alutsista, Penggunaan Alutsista, ABRI.

## PENDAHULUAN

Alutsista adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI). Alutsista menjadi bagian penting bagi TNI dalam melaksanakan tugas baik dalam rangka Operasi Militer maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sejarah penggunaan dan pengadaan Alutsista bagi Angkatan Bersenjata Indonesia, dapat dilihat sejak dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai bentuk Angkatan Bersenjata Indonesia yang pertama.

BKR yang saat itu merupakan aparat yang bertugas menjaga keamana setempat, berhasil memelopori pelucutan senjata-senjata dari tentara Kekaisaran Jepang (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000a). Perkembangan kekuatan alutsista berikutnya, terjadi setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pasca terjadinya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Desember 1949. Berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam KMB, militer Belanda harus meninggalkan Indonesia secara bertahap dan tanggung jawab keamanan harus diserahkan seluruhnya kepada Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI 2000).

Selain menerima hibah, terdapat juga pembelian persenjataan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Belanda dalam kurun waktu 1950-1952. Menurut data SIPRI (*Stockholm International Peace Research*

*Institute*) pengadaan alutsista yang senilai 266 juta dolar AS, meliputi 9 unit kapal patroli, 2 unit kapal korvet/*Corvette*, 5 unit kapal pendarat/*landing craft*, 4 unit kapal penyapu ranjau, 1 unit kapal perusak/*Destroyer*, 85 unit pesawat ringan, 47 unit pesawat pembom, 28 unit pesawat angkut, 26 unit pesawat tempur dan 16 unit pesawat latih (Laksmana et al., 2020). Kekuatan ini merupakan alutsista yang dimiliki TNI pasca perang kemerdekaan.

Selama kurun waktu 1952 hingga 1957, pemerintah Indonesia juga melakukan pengadaan alutsista yang dilakukan dengan Italia sebesar 18,5 Juta Dolar AS, yang meliputi pembelian kapal baru berupa 2 kapal *Corvette* (diregistrasikan sebagai kelas Pattimura) dan 2 kapal *Frigate* (diregistrasikan sebagai kelas Imam Bonjol). Pemerintah Indonesia juga telah menyepakati pengadaan alutsista dengan Jerman Barat berupa 10 unit kapal penyapu ranjau/*Minesweeper* kelas Raum (*R-Boot class*) pada tahun 1953 dan 8 unit kapal Cepat Torpedo/*Motor Torpedo Boat* (MTB) kelas *Jaguar* pada tahun 1956 untuk ALRI. Pengadaan alutsista juga dilakukan dengan Amerika Serikat dan Kanada, berupa pembelian serta hibah yang terdiri dari: 2 pesawat angkut ringan, 10 helikopter ringan, 45 pesawat latih, 6 pesawat ringan, 5 kapal patroli dan 8 pesawat patroli maritim.

Meski modernisasi kekuatan persenjataan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) telah dilakukan selama tahun 1950-an, akan tetapi pada kurun waktu tersebut, Indonesia tengah mengalami permasalahan berbagai gerakan pemberontakan atau separatisme. Permasalahan separatisme itu mengakibatkan berkurangnya jumlah dan kekuatan Alutsista APRI. Menjelang akhir dekade 1950-an, menjadi momen untuk kebangkitan kekuatan alutsista APRI. Pada tahun 1958-1959 terjadi konflik perebutan Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda. Konflik

tersebut menjadikan pemerintah untuk lebih memprioritaskan pengadaan alutsista.

Sebagai langkah awal, pemerintah Indonesia melakukan kontrak pengadaan alutsista dengan negara-negara Eropa Barat atau Blok Barat. Namun, pengadaan alutsista strategis dengan negara blok Barat harus terhenti, karena terjadinya ketegangan pemerintah Indonesia dengan pemberontak PRRI/Permesta yang merupakan dari proxy dari negara blok Barat dan meningkatnya ketegangan dengan Belanda dalam sengketa Irian Barat (Djamhari, 1995).

Sehingga dilakuan pembatasan penjualan senjata atau embargo oleh negara Blok Barat. Akibat dari embargo yang dilakukan oleh negara-negara Blok Barat, pemerintah Indonesia mulai mengalihkan pengadaan alutsista kepada negara-negara Blok Timur. Hubungan kerjasama dengan negara Blok Timur telah dilakukan pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II.

Kemudian pada masa kabinet Djuanda, ditandai proses kontrak pembelian senjata dengan Polandia, Cekoslowakia dan Yugoslavia. Kontrak ini terdiri dari kapal-kapal perang dan pesawat-pesawat udara sebesar 60 juta dolar AS pada 6 April 1958 (Nasution, 1989). Pada tahun-tahun berikutnya, dengan semakin eratnya hubungan Indonesia dengan negara Blok Timur menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi besarnya kekuatan militer Indonesia, terutama sepanjang tahun 1959-1969. Sampai hari ini, masih banyak alutsista pengadaan tahun 1959-1969 yang masih bertahan dan operasional.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang Alutsista Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari tahun 1959 hingga 1969. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengadaan dan penggunaan alutsista Angkatan Bersenjata selama 10 tahun yakni dari tahun 1959 hingga 1969. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan mengenai sejarah perkembangan alutsista Angkatan Bersenjata Indonesia, baik yang berasal dari negara Blok Timur maupun Blok Barat sepanjang tahun 1960an.

Adapun dua penelitian relevan dengan tema pembahasan yang berkaitan sejarah alutsista. Pertama adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Achamd Febrianto dari Universitas Negeri Surabaya berjudul: *“Alat Utama Sistem Persenjataan Dalam Upaya Pembebasan Irian Barat Tahun 1961-1962”* pada tahun 2014. Kesimpulan tulisan ini adalah sudah menjadi keharusan untuk melakukan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam upaya pembebasan Irian Barat yang berfokus pada tahun 1961-1962. Penelitian selanjutnya adalah skripsi ditulis oleh Bambang Slamet Riyadi dari Universitas Sebelas Maret yang berjudul: *“Perkembangan Kekuatan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) 1959-1965”* pada tahun 2007. Hasil penelitian ini berfokus mengenai perkembangan kekuatan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) yang mencapai puncak kedigdayaannya selama kurun waktu 5 tahun dari 1959-1965.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan sejarah yang diungkapkan oleh Louis Gottschalk (Gottschalk & Notosusanto, 1983). Metode penulisan sejarah terdiri dari empat tahapan yakni: heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah (Kuntowijoyo, 2013).

Pada tahap pertama, penulis melakukan pengumpulan sumber atau heuristik terhadap sumber-sumber maupun informasi yang sesuai dengan tema penelitian. Penulis membagi sumber informasi menjadi sumber informasi primer dan sumber informasi sekunder. Dalam penelitian, sumber primer yang penulis kumpulkan adalah dokumen tertulis berupa arsip-arsip foto dan koran-koran sezaman mengenai alutsista dan militer Indonesia. Selanjutnya untuk sumber sekunder, penulis menggunakan sumber dari berbagai literatur berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel dan internet yang relevan dengan topik penelitian.

Tahap kedua, data yang telah diperoleh penulis kemudian dilakukan verifikasi atau kritik sumber. Pada tahap ini terbagi menjadi dua macam, yakni kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal berfungsi untuk memastikan kredibilitas sumber dari isi informasi yang telah dimuat pada sumber tersebut. Kritik eksternal dilakukan untuk mengetahui keaslian dari sumber sejarah, sehingga dipastikan bahwa sumber tersebut asli bukan berupa tiruan maupun palsu.

Tahap ketiga adalah Interpretasi adalah proses penafsiran sumber-sumber sejarah yang sebelumnya telah dilakukan kritik sumber atau verifikasi. Tahap interpretasi dibagi menjadi dua tahap, yakni analisis dan sintesis. Setelah fakta-fakta diperoleh, maka penulis melakukan penafsiran dan menjadi kesatuan fakta sejarah.

Tahap terakhir adalah Histiografi atau penulisan sejarah, proses menyusun hasil rekonstruksi imajinatif masa lalu sesuai dengan bukti yang ada serta diwujudkan dalam bentuk tulisan sejarah yang koheren.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Politik Indonesia Tahun 1959-1966**

#### **1) Kampanye Pembebasan Irian Barat**

Setelah pemerintah Belanda memutuskan untuk mengirim kapal induk HNLMS *Karel Doorman* menuju Irian Barat pada 4 April 1960, membuat pihak Belanda terus meningkatkan kekuatan militer mereka dan mempercepat pembentukan negara Papua. Indonesia merespon dengan menyusun Rencana Operasi Gabungan merebut Irian Barat oleh Gabungan Kepala Staf (GKS) yang ditunjuk oleh Presiden Sukarno. Pada 12 April 1961, GKS melakukan rapat untuk memutuskan langkah-langkah yang akan diambil dan membentuk panitia penyusun Rencana Operasi Gabungan merebut Irian Barat. Hasil dari rapat tersebut adalah mempersiapkan rencana Operasi Gabungan dalam rangka pembebasan Irian Barat.

Pemerintah Indonesia membentuk Dewan Pertahanan Nasional (Depertan) yang diresmikan pada 11 Desember 1961 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 618 Tahun 1961. Tujuan dari pembentukan Depertan adalah untuk merumuskan cara untuk mengintegrasikan seluruh potensi nasional dalam pembebasan Irian Barat (Nasution, 1989a). Pada 14 Desember 1961, Depertan melangsungkan sidang pertama dan berhasil merumuskan pembentukan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (KOTI Pimirbar). Depertan merumuskan keputusan konsep dasar perjuangan pembebasan Irian Barat. Konsep dasar ini kemudian dikenal sebagai Tri Komando Rakyat (Trikorra) dan Presiden Sukarno mendeklarasikan pelaksanaan Trikorra pada 19 Desember 1961 di alun-alun kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Menggagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Kolonial Belanda.
2. Mengkibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat (Ridhani, 2009).

## **2) Konfrontasi Indonesia-Malaysia**

Setelah Operasi Pembebasan Irian Barat dari Belanda selesai dilaksanakan, Indonesia menghadapi babak baru, yakni terjadi politik konfrontasi dengan Malaysia. Latar belakang dari konfrontasi ini adalah penolakan terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang pro terhadap Blok Barat. Hal ini dipandang oleh Presiden Sukarno sebagai kebijakan yang pro terhadap Neo-Kolonialisme dan Imperialisme (Nekolim). Presiden Sukarno memiliki harapan besar akan terbentuknya

negara Kalimantan Utara yang bersekutu dengan Indonesia yang anti dengan Nekolim (Oktorino, 2018).

Isu Kalimantan Utara juga mendapat sambutan dari Presiden Filipina, Diosdado Macapagal, yang beralasan bahwa secara historis dan yuridis, daerah Sabah merupakan milik Sultan Sulu yang disewakan kepada Inggris (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000c). Pemerintah Indonesia, Filipina dan Malaysia mengadakan perundingan dengan tujuan untuk meredakan ketegangan antara negara tersebut. Kemudian, diadakan serangkaian pertemuan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina selama bulan Juni hingga Agustus 1963 di Manila. Pertemuan-pertemuan ini menghasilkan *Manila Accord*, *Manila Declaration*, dan *Joint Statement* (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000c). Presiden Macapagal mengusulkan pembentukan federasi antar Rumpun Bangsa Melayu yang dikenal sebagai Malaysia, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO) (Arsana & Ambar Wulan, 2014).

Kemudian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB menindaklanjuti hasil dari KTT Manila dengan membentuk Misi Malaysia. Misi ini bertugas untuk mengadakan penyelidikan di Sabah dan Serawak untuk memastikan kehendak rakyat mengenai pembentukan Federasi Malaysia. Akan tetapi, Inggris dan Persekutuan Tanah Melayu tetap memproklamasikan pembentukan Federasi Malaysia di Kuala Lumpur pada 16 September 1963. Keesokan harinya, Pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia pada 17 September 1963.

Pada 17 Januari 1964, Presiden Sukarno bertemu dengan Jaks Agung AS, Robert Kennedy, di Tokyo disela-sela kunjungan ke Jepang (Arsana & Ambar Wulan, 2014). Hasil dari pertemuan ini tercapainya kesepakatan “*cease fire*” (penghentian tembak-menembak) antara Malaysia dan Indonesia mulai tanggal 25 Januari 1964 (Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, 1979). Setelah tercapainya kesepakatan “*cease fire*”, selanjutnya dipersiapkan Konferensi Tingkat Menteri pada Februari dan Maret 1964 di Bangkok, Thailand. Namun, hasil dari Konferensi Tingkat Menteri yang kedua ini kembali mengalami kegagalan.

Menghadapi situasi yang makin panas, maka pemerintah Indonesia menyatakan politik konfrontasi terhadap Malaysia akan terus berlanjut (Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, 1979). Kegeraman Presiden Sukarno atas tindakan dan tingkah laku dari Malaysia ini dilontarkan dalam sebuah pidato umum pada 12 April 1964, yang terkenal sebagai “Ganyang Malaysia” (Oktorino, 2018). Untuk merealisasikan politik “Ganyang Malaysia”, Presiden Sukarno mengeluarkan seruan Komando Aksi Sukarelawan pada 3 Mei 1964 yang dikenal sebagai Dwi Komando Rakyat (Dwikora). Seruan Dwikora berisi sebagai berikut:

1. Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia,
2. dan bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, Brunei untuk membubarkan Negara Boneka Malaysia” (Arsana & Ambar Wulan, 2014).

## **Pengadaan Alutsista Angkatan Bersenjata Periode 1959-1966**

### **1) Pengadaan Alutsista Dengan Negara Blok Barat**

Untuk mendukung dan melaksanakan Operasi Trikora, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperbesar serta memperkuat alutsista APRI. Pemerintah Indonesia dan APRI menyadari bahwa terdapat ketidakseimbangan, antara kekuatan militer Indonesia dengan militer Belanda. Faktor lain adalah sepanjang dekade 1950-an, kekuatan dan anggaran APRI dihabiskan dengan menggelar operasi pemulihan keamanan dalam negeri. Karena faktor-faktor tersebut, menjadikan alasan Kabinet Kerja I untuk memulai memodernisasi kekuatan APRI (Patiara et al., 1983). Rencana pengadaan alutsista ditunjukkan kepada negara-negara industri serta produsen alutsista. Namun, keadaan dunia pada saat itu tengah memasuki Perang Dingin. Perang Dingin terjadi antara Blok Barat atau negara yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), aliansi negara-negara Eropa Barat dan Kanada yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Sementara, Blok Timur atau negara yang tergabung dalam Pakta Warsawa (*Warsaw Pact*), aliansi negara-negara Eropa Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet.

Perang Dingin sangat mempengaruhi kebijakan pengadaan alutsista bagi Indonesia. Salah satunya, terjadi pada saat rapat yang berlangsung di Staf Umum Angkatan Darat (SUAD). Pihak Angkatan Darat belum sepakat mengenai pembelian persenjataan dari Uni Soviet dan lebih mengharapkan pembelian persenjataan dari Blok Barat. Sementara pihak Angkatan Udara dan Angkatan Laut secara bulat

menerima penawaran senjata dari Uni Soviet dan Blok Timur (Nasution, 1989a). Pengadaan alutsista dengan negara Blok Barat telah dilakukan APRI terutama dari pihak Angkatan Darat. Kolonel Ahmad Yani sebagai Deputi II Angkatan Darat, menjadi perwakilan Indonesia dalam misi pengadaan alutsista ke sejumlah negara Eropa Barat. Keberhasilan Kolonel Ahmad Yani terjadi pada 15 Mei 1959, ketika ditandatanganinya pengadaan alutsista dari Inggris berupa pembelian 179 unit Panser *Alvis* untuk ADRI (Hadinoto, 1988).

Kolonel Ahmad Yani juga berhasil melakukan kontrak pembelian alutsista dengan perusahaan senjata asal Swedia, yakni *Bofors*. Kontrak tersebut terdiri atas: 36 unit Artileri Sasaran Udara (*Arsu*) *Bofors* L/70 40mm, terdiri atas 30 unit *Bofors* L/70 40mm versi tarik/*towed* untuk ADRI dan 6 unit *Bofors* L/70 40mm versi *naval* untuk ALRI (Adjie Nogo Seno, 2016). Pengadaan alutsista juga dilakukan dengan negara Perancis dan Kanada. Amerika Serikat menjadi salah satu negara prioritas utama dalam memperoleh alutsista. Beberapa cara ditempuh untuk untuk melobi pemerintah Amerika Serikat dalam mendapatkan izin pengadaan alutsista. Salah satunya dilakukan, Jenderal Abdul Haris (A.H.) Nasution yang melakukan kunjungan ke Amerika Serikat pada Oktober 1960. Namun, usaha tersebut harus menemui kegagalan. Penyebabnya adalah pemerintah Amerika Serikat menolak untuk menjual alutsista yang diinginkan pihak Indonesia. Penolakan tersebut beralasan bahwa Indonesia bukan bagian dari negara sekutu Amerika Serikat. Ditambah pembelian harus diputuskan oleh Kongres AS. Selain itu, terdapat kekhawatiran alutsista tersebut akan digunakan untuk melawan Belanda.

Pembatasan penjualan senjata juga berlaku ketika Indonesia membeli kapal MTB kelas *Jaguar* dari Jerman Barat. Kapal MTB ini tidak dilengkapi oleh torpedo. Sehingga kapal MTB kelas *Jaguar* yang diterima oleh ALRI, hanya dilengkapi tabung peluncur torpedo. Menurut rencana, kapal-kapal MTB kelas *Jaguar* tersebut akan dilengkapi dengan torpedo yang akan dibeli dari Inggris. Namun, karena Kampanye Pembebasan Irian Barat dari Belanda, pemerintah Inggris memberlakukan larangan pengiriman senjata (embargo), termasuk torpedo, terhadap Indonesia (Pour, 1997). Akan tetapi, Pemerintah Amerika Serikat tetap membuka penjualan alutsista kepada Indonesia, meski terdapat pembatasan penjualan alutsista tertentu. Berdasarkan laporan dari *National Security Council* (NSC), usaha pengadaan alutsista kepada Amerika Serikat berhasil diwujudkan melalui *Mutual Security Act 1954* (State, 1959). Keberhasilan ini tidak lepas dari kunjungan Presiden Sukarno ke Amerika Serikat pada akhir tahun 1959. Pemerintah Amerika Serikat memberikan rasa terima kasih atas pembebasan penerbang bayaran dari Central Intelligence Agency (CIA), yakni Allan Lawrence Pope, yang ditembak jatuh karena ikut mendukung pemberontakan PRRI/Permesta (Purbaningsih, 2005).

## **2) Pengadaan Alutsista Dengan Negara Blok Timur**

Menurut Jenderal A.H. Nasution, rencana pengadaan alutsista dari Blok Timur atau yang tergabung ke dalam Pakta Warsawa sudah dilakukan melalui banyak pertimbangan. Sebelumnya, pemerintah Indonesia berusaha melakukan pengadaan alutsista strategis dan offensif kepada negara Blok Barat. Namun, terjadi penolakan untuk menjual alutsista (embargo) kepada Indonesia. Sementara, negara Blok

Timur dengan tangan terbuka bersedia menjual alutsista yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia (Ridhani, 2009). Uni Soviet sebagai pemimpin dari negara Blok Timur, telah menawarkan bantuan persenjataan untuk Indonesia sejak pertengahan 1950-an. Salah satu penawaran ini tertuang melalui pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) Subandiro, "Bahwa Uni Soviet telah menawarkan senjata yang lebih baik dengan harga lebih murah daripada negara-negara Barat" ("Sovjet Tawarkan Sendjata Pd Indonesia," 1958). Penawaran alutsista dari negara Blok Timur juga mendapatkan sambutan yang baik dari pihak AURI dan ALRI.

Sebelumnya telah diwujudkan pengadaan alutsista pada era Kabinet Ali Sastroamidjojo II dengan melakukan pembelian mobil jeep jenis GAZ-69 yang kurang lebih berjumlah seribu unit pada tahun 1956 (Nasution, 1989a). Selanjutnya pada tahun 1958, kabinet Djuanda kembali melakukan usaha pengadaan alutsista dengan negara Blok Timur. Beberapa usaha tersebut berhasil dengan dilakukan kontrak pengadaan alutsista sebesar 60 juta dolar AS dari Cekoslowakia, Polandia dan Yugoslavia pada 6 April 1958 (Nasution, 1989a). Uni Soviet kembali melakukan penawaran bantuan militer sebesar 200 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Penawaran tersebut dilakukan, ketika Nikita Khrushchev sebagai pemimpin Uni Soviet saat itu, melakukan kunjungan ke Indonesia pada 18 Februari hingga 1 Maret 1960 (Nasution, 1989a). Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan pengadaan alutsista dengan Uni Soviet. Pada akhir Desember 1960, pemerintah Indonesia mengutus misi pengadaan alutsita yang dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution ke Uni Soviet (Nasution, 1989a).

Misi pengadaan alutsista ini dikenal sebagai “Misi Nasution” dan berhasil dengan ditandatanganinya pengadaan alutsista sebesar 500 Juta Dolar AS dari Uni Soviet. Pengadaan alutsista tersebut dilakukan dengan mekanisme pembayaran melalui kredit berjangka 10 tahun dengan bunga 2,5 persen pada 3 Januari 1961. Hingga saat itu, merupakan kontrak pengadaan alutsista terbesar yang pernah dilakukan Indonesia. Namun, terdapat kekurangan dalam kontrak pengadaan alutsista. Alasannya terdapat kekurangan mengenai kelengkapan pertahanan udara nasional serta ada tambahan keperluan bagi ADRI, ALRI dan AURI (Nasution, 1989a). Jenderal A.H. Nasution kembali terbang menuju ke Moskow untuk menandatangani kontrak pengadaan alutsista yang kedua pada Juni 1961. Dalam kontrak pengadaan alutsista yang kedua, membahas mengenai proses pengiriman, persiapan pangkalan udara dan laut, dan pelatihan teknisi alutsista (Nasution, 1989a). Pada akhir September 1964, misi pengadaan alutsista dilanjutkan. Jenderal A.H. Nasution berpendapat bahwa tujuan dari misi pengadaan ini adalah sebagai persiapan dalam menghadapi Malaysia dan Inggris, apabila Konfrontasi dengan Malaysia meningkat eskalasinya menuju perang terbuka.

### 3) Tabel Daftar Pengadaan Alutsista Periode 1959-1966

Tabel 1. Pengadaan Alutsista Angkatan Bersenjata periode 1959-1966

Negara	Jenis Alutsista	Alutsista	Jumlah	Tahun Pembelian	Tahun Diterima
Inggris	Panser	Alvis <i>Saracen,</i>	179 unit	1959	1959-1960

		<i>Ferret dan Saladin</i>			
Swedia	Artileri Pertahanan Udara	<i>Bofors L/70 40mm</i>	36 unit	1959	1960-1962
Perancis	Tank	AMX-13	175 unit	1959	1960-1962
Kanada	Pesawat	<i>de Havilland Canada DHC-3 Otter</i>	7 unit	1958-1959	1959-1960
Amerika Serikat	Pesawat Angkut	<i>C-130B Hercules</i>	10 unit  (8 pesawat angkut dan 2 pesawat tanker, beserta suku cadang)	1959	1960-1961
	Pesawat Tempur	<i>P-51D Mustang</i>	35 unit	1960	1961
	Kapal Pendarat Tank/LST	Kelas Teluk Langsa	5 unit	1960	1960-1961
Jepang	Kapal Tender Kapal Selam/ <i>Submarine Tender</i>	(RI Multatuli)	1 unit	1960	1961
Cekoslowakia	Pesawat Tempur	<i>Mikoyan MiG-17 Fresco</i>	30 unit S-104  lisensi Cekoslowakia)	1958	1958-1960

Polandia	Pesawat Temprur	<i>Mikoyan</i> MiG-17 <i>Fresco</i>	40 unit PZL- <i>Mielec</i> Lim-5P lisensi Polandia	1958	1958-1960
Uni Soviet	Kapal Penjelajah	Kelas <i>Sverdlov</i> ( <i>Sverdlov</i> Class) RI Irian	1 unit	1961	1962
	Kapal Selam	Kelas <i>Whiskey</i> ( <i>Whiskey</i> Class)	14 unit (2 unit dijadikan suku cadang/ <i>spare</i> <i>part</i> )	1958-1961	1959-1962
	Pesawat Pembom	<i>Tupolev</i> Tu-16 <i>Badger</i>	26 unit (14 unit Tu-16 <i>Badger A</i> dan 12 unit varian Tu- 16KS <i>Badger B</i> )	1961	1962
	Pesawat Tempur	<i>Mikoyan</i> MiG-21 <i>Fishbed</i>	22 unit (20 unit varian MiG-21F-13 <i>Fishbed</i> dan 2 unit varian MiG-21U-400)	1961	1963-1965
	Helikopter Angkut	Mil Mi-4A <i>Hound</i>	44 unit	1959-1963	1961-1965

		Mil Mi-6 <i>Hook</i>	9 unit	1962	1965
--	--	-------------------------	--------	------	------

## Penggunaan Alutsista Angkatan Bersenjata Periode 1959-1966

### 1) Operasi Trikora

Setelah Trikora dideklarasikan, Pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala (KOLA) pada 31 Desember 1961 sebagai komando gabungan (*Unified Command*) yang terdiri atas tiap matra Angkatan Perang Republik Indonesia dengan tugas menyelenggarakan operasi militer dalam rangka membebaskan wilayah Irian Barat (Ridhani, 2009). Pada 15 Januari 1962, terjadi pertempuran Laut Arafura yang melibatkan ALRI dengan AL Belanda (KM) di laut Arafura. Pertempuran ini melibatkan 3 unit Kapal MTB kelas *Jaguar* milik ALRI dengan pesawat intai maritim P2V-7 *Neptune* dan kapal AL Beland/*Koninklijke Marine* (KM). Pertempuran yang tidak seimbang menyebabkan tenggelamnya RI Macan Tutul beserta Komodor Yosaphat "Yos" Sudarso, ajudannya Kapten Memet Sastrawiria, Komandan RI Macan Tutul Kapten Wiratno dan 25 personel lainnya (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000c).

Setelah terjadinya peristiwa pertempuran Laut Arafura, seluruh misi infiltrasi berada di bawah KOLA. Salah satu misi infiltrasi yang berada di bawah pengawasan KOLA adalah Operasi Badar Lumut yang pelaksanaan operasi dilakukan pada 28 Juni 1962 dengan menggunakan 5 unit kapal MTB, yang terdiri dari: 3 kapal MTB kelas *P-6* dan 2 kapal MTB kelas *Jaguar* (Ridhani, 2009). Selanjutnya, dilaksanakan Operasi Cakra untuk memperoleh keunggulan di laut sebagai persiapan operasi

amfibi dalam rangka operasi Jayawijaya (Ridhani, 2009). Operasi Cakra berlangsung pada 20 hingga 29 Juli 1962. Dengan unsur kekuatan yang digunakan 4 unit Kapal Selam: RI Nagabanda (503), RI Trisula (504), RI Candrasa (505), RI Nagarangsang (506). Tujuan Operasi Cakra adalah melakukan pengintaian di kota-kota pelabuhan penting Irian Barat dengan jalan pemburuan bebas (*free hunting*) dan perang perbatasan (*border clash*) (Cholil, 1979).

Operasi Jayawijaya merupakan Operasi Gabungan dengan pelaksanaan dilakukan pada 12 Agustus 1962, yang mengerahkan pasukan KOLA sebanyak 70.000 personel dengan tujuan melakukan serangan terbuka dengan sasaran utamanya adalah Biak dan Hollandia (Kotabaru/Jayapura) (Ridhani, 2009). Pada 25 Juni 1962, telah diputuskan rencana operasi masing-masing dipimpin oleh:

1. Komodor (P) Sudomo memimpin *Amphibious Task Force*/Angkatan Tugas Amfibi-17 (ATA-17),
2. Brigjen Umar Rukman memimpin *Landing Force*/Pasukan Pendarat-45 (Pasrat-45),
3. Komodor (U) Leo Wattimena memimpin serangan udara,
4. Panglima KOLA Mayjen Suharto memimpin langsung *Airborne*/Penerjunan (Ridhani, 2009).

Pada 17 Juli 1962, dimulai pelaksanaan Operasi Jayawijaya ditandai sebagai hari embarkasi/keberangkatan ATA-17 dari Pangkalan I, Pangkalan II dan Pangkalan III menuju Daerah Kumpul I (DK-I) di Teluk Peleng, Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah (Sumarkidjo, 2010). Tanggal 2 Agustus 1962, seluruh kekuatan ATA-17 telah siap berkumpul di DK I. Panglima KOLA Mayor Jendral (Mayjen) Suharto, tiba di DK I pada 5 Agustus 1962. Namun, kedatangan Panglima KOLA

menyampaikan bahwa, hari “H” Operasi Jayawijaya diundur menjadi “H+14”, yakni pada 26 Agustus 1962.

Kemudian pada 15 Agustus 1962, pihak Indonesia dan Belanda menandatangani Persetujuan New York di Markas Besar PBB. Presiden Sukarno mengeluarkan perintah untuk menghentikan tembak menembak yang berlaku mulai 18 Agustus 1962 pukul 09.31 WIT (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000c). Dengan demikian maka Operasi Jayawijaya sebagai Operasi Gabungan terbesar yang pernah dilakukan oleh ABRI tidak jadi dilaksanakan. Panglima KOLA dengan resmi mengumumkan berlakunya gencatan senjata pada 25 Agustus 1962 (Ridhani, 2009).

## **2) Operasi Dwikora**

Untuk mendukung Dwikora, diperlukan koordinasi satuan ABRI yang berada di perbatasan dalam melaksanakan operasi militer. Sehingga dibutuhkan suatu Komando yang dapat menaungi dan meliputi segala pasukan bersenjata (Hadiningrat, 1971). Pada 16 Mei 1964, dibentuk Komando Gabungan Siaga (KOGA) berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Pangti ABRI/KOTI No.23/KOTI/1964 (Arsana & Ambar Wulan, 2014). KOGA digantikan oleh Komando Siaga (KOSIAGA) berdasarkan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/KOTI No.32/KOTI/1964 pada 2 Juni 1964. Pada 28 Februari 1965, KOSIAGA disempurnakan menjadi Komando Mandala Siaga (KOLAGA) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9/KOTI/1965 (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000c). KOLAGA mempunyai tugas untuk merencanakan dan melaksanakan operasi militer dalam rangka pelaksanaan Dwikora

serta mempertahankan wilayah Barat Republik Indonesia (Arsana & Ambar Wulan, 2014).

Operasi Udara dilakukan oleh AURI dalam mendukung pelaksanaan Operasi Dwikora. Kegiatan AURI yang dilakukan adalah melakukan pengintaian dan pemotretan udara di wilayah Malaysia Barat serta Timur, melakukan patrol udara, dan melakukan operasi penyusupan berupa penerjunan yang dilakukan oleh PGT (Arsana & Ambar Wulan, 2014). Untuk mendukung operasi tersebut diperkirakan kekuatan yang dimiliki oleh AURI adalah sekitar 25-30 unit pesawat pembom Tu-16 *Badger A* dan Tu-16KS *Badger B* di Lanud Iswahjudi, 25-30 unit pesawat pembom Il-28T *Beagle* di Palembang dan Pontianak, 24 unit pesawat P-51D *Mustang*, satu Skadron pesawat tempur MiG-17, MiG-19 dan MiG-21 yang ditempatkan pada lanud utama, serta sejumlah situs Penangkis Serangan Udara (PSU) dan satu Batalion Arhanud dengan 6 peluncur rudal anti-pesawat SA-2 di Jakarta (Oktorino, 2018). Operasi Laut dilaksanakan oleh ALRI dalam rangka mendukung Operasi Dwikora. ALRI mempunyai tugas untuk melakukan pelatihan operasional Armada, operasi tempur dan khusus di perairan Indonesia, melaksanakan patroli perang dan pengintaian tentang pergerakan kapal asing serta satuan tempur musuh di perairan Indonesia, mengangkut serta mengawal pемidahan pasukan bersama logistik dan perlengkapan perang ke daerah perbatasan, dan mengadakan "*show of force*" dalam bentuk latihan (Arsana & Ambar Wulan, 2014).

Konfrontasi dengan Malaysia membuat ekonomi dalam negeri mengalami penurunan dengan cepat. Sekitar 60 persen pengeluaran anggaran pemerintah Indonesia digunakan untuk membiayai kampanye

Operasi Dwikora (Oktorino, 2018). Setelah Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 7 Januari 1965, situasi ekonomi menjadi makin parah. Inflasi tidak dapat terkendali lagi pada pertengahan 1965. Karena situasi politik dan ekonomi dalam negeri yang tidak terkendali lagi, membuat para pemimpin ABRI, terutama Angkatan Darat, membuat sebuah rencana untuk menghentikan Konfrontasi dengan Malaysia (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000c). Terjadi peristiwa pemberontakan G-30S/PKI pada 30 September 1965. Sehingga perhatian ABRI ditujukan untuk menumpas pemberontakan ini (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000c). Setelah pemberontakan G-30S/PKI berhasil ditumpaskan, kelanjutan operasi Dwikora kembali dilanjutkan. Pada 22 Februari 1966, dibentuk Komando Ganyang Malaysia (KOGAM) 1966 dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Malaysia dan menggantikan Badan Tertinggi yakni Komando Tertinggi (KOTI).

Namun, setelah Presiden Sukarno menyerahkan kekuasaannya kepada Letnan Jenderal (Letjen) Suharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966, pelaksanaan Dwikora semakin menurun. Pada akhirnya kedua negara memutuskan bersepakat untuk damai di Jakarta pada 11 Agustus 1966. Keputusan ini dikenal sebagai *Jakarta Accord*. Kemudian pada 2 Juni 1967, Komando Mandala Siaga dibubarkan dan dibuka kembali hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia pada 31 Agustus 1967 (Arsana & Ambar Wulan, 2014).

## Kondisi Politik Indonesia Tahun 1959-1966

### 1) Peralihan Kekuasaan Dari Presiden Sukarno kepada Jenderal Suharto

Memasuki awal tahun 1966, kondisi dalam negeri semakin parah setelah terjadinya hyperinflasi yang mencapai 650%. Disusul dengan Penetapan Presiden No. 27/1965 tentang kenaikan tarif dan jasa karena pengaruh devaluasi rupiah. Selanjutnya, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan minyak tanah pada 3 Januari 1966. Hal ini membuat kalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) melakukan aksi protes terhadap kebijakan pemerintah (Marwati Djoened et al., 2008). Pada 10 Januari 1966, KAMI melakukan aksi dengan menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) kepada pemerintah sebagai berikut:

1. Bubarkan PKI
2. Rombak Kabinet Dwikora
3. Turunkan Harga Pangan

Aksi Tritura ini didukung oleh banyak kalangan, termasuk oleh ABRI. Keadaan ini semakin memperburuk stabilitas dalam negeri dan pemerintahan Presiden Sukarno. Untuk menyelamatkan pemerintahannya, Presiden Sukarno melakukan *reshuffle* kabinet dengan mengumumkan pembentukan kabinet Dwikora II pada 21 Februari 1966 (Ricklefs, 2007).

Kabinet Dwikora II dikenal sebagai “Kabinet 100 Menteri”, karena banyak jumlah Menteri dalam kabinet ini. Dalam kabinet perombakan kabinet ini, Presiden Sukarno tetap mempertahankan tokoh-tokoh PKI beserta simpatisan. Sementara, kelompok penentang PKI tidak

dipertahankan dalam kabinet yang baru. Pembentukan Kabinet Dwikora II ini mengecewakan pihak mahasiswa dan pihak ABRI yang anti Komunis. Pada 10 Maret 1966, Presiden Sukarno bertemu wakil-wakil partai NU, PSII, IPKI, Perti, Partai Katolik, Parkindo, PNI-Asu, Partindo dan Muhammadiyah. Pertemuan ini tidak memuaskan semua pihak, karena permintaan untuk pembubaran PKI tidak dipenuhi (Marwati Djoened et al., 2008). Keesokan harinya pada 11 Maret 1966, Kabinet Dwikora mengadakan sidang paripurna yang terakhir di Jakarta. Namun Letjen Suharto tidak menghadiri sidang dan Presiden Sukarno tidak mengikuti sidang sampai selesai. Presiden Sukarno segera pergi menuju Bogor menggunakan helikopter Kepresidenan *Sikorsky S-61V*, karena terdapat alasan keamanan.

Pada malam hari di Bogor, Presiden Sukarno bertemu tiga Jenderal yang hadir sebagai perwakilan Letjen Suharto, yakni: Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen Muhammad Yusuf Amir (M.Yusuf) dan Brigjen Amir Machmud. Dalam pertemuan ini, tiga Jenderal tersebut mendesak Presiden Sukarno untuk menandatangani sebuah dokumen yang memberi Suharto kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban, menjalankan pemerintahan dan melindungi Presiden. Dokumen ini dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar (Ricklefs, 2007). Melalui Supersemar, Letjen Suharto adalah melakukan pelarangan terhadap PKI dan seluruh organisasi massanya pada 12 Maret 1966 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966. Kemudian, dikeluarkan Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahan 15 Menteri yang dianggap terlibat dalam pemberontakan G-30S/PKI. Pada 25 Juli 1966, Presiden Sukarno

membentuk Kabinet Ampera I berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor XIII/MPRS/1966 yang menugaskan Jenderal Suharto membentuk Kabinet. Pada 12 Maret 1967, sidang MPRS menetapkan bahwa Presiden Sukarno diberhentikan serta dicabut mandatnya sebagai Presiden. Dalam sidang ini, MPRS juga mengangkat Jenderal Suharto sebagai Pejabat Presiden berdasarkan Tap MPRS Nomor XXXIII/1967 dan membentuk Kabinet Ampera II. Pada 27 Maret 1968, Pejabat Presiden Suharto dilantik menjadi Presiden berdasarkan Tap MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968 (Marwati Djoened et al., 2008).

## **2) Perubahan Arah Politik Luar Negeri**

Setelah berakhirnya pemerintah Presiden Sukarno, arah politik luar negeri Indonesia juga mengalami perubahan. Salah satunya ditandai dengan berakhirnya konfrontasi dengan Malaysia. Selain itu, Indonesia mulai memperbaiki politik luar negeri menjadi selaras dengan kepentingan nasional, yakni menjadi lebih bebas dan aktif. Hal ini tertuang dalam Keputusan MPRS Nomor XII/MPRS/1966. Pada 28 September 1966, Indonesia kembali masuk ke PBB setelah keluar pada 1 Januari 1965 akibat konfrontasi dengan Malaysia (Ricklefs, 2007). Perubahan sikap politik luar negeri Indonesia juga ditunjukkan kepada negara-negara Blok Timur atau Sosialis-Komunis. Pada 30 Oktober 1967, terjadi pemutusan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pemutusan hubungan diplomatik ini beralasan, bahwa RRT diduga terlibat dalam peristiwa G-30S/PKI. Pemutusan hubungan

diplomasi juga dilakukan terhadap negara Kuba (Marwati Djoened et al., 2008). Hubungan dengan negara Blok Timur, terlebih khusus Uni Soviet, juga merenggang.

Sementara negara-negara Blok Barat, terutama Amerika Serikat, sangat mendukung perubahan sikap politik luar negeri Indonesia yang menjadi anti terhadap komunis. Salah satunya ditunjukkan oleh Jepang yang menawarkan bantuan keuangan sebesar 30 Juta Dolar AS (Ricklefs, 2007). Indonesia juga berusaha memulihkan hubungan politik luar negeri dengan negara tetangga dengan mengakui secara resmi Republik Singapura pada 2 Juni 1966 (Marwati Djoened et al., 2008). Tujuannya untuk memperbaiki citra politik luar negeri menjadi bebas aktif, sehingga tidak dipandang sebagai negara agresif di daerah kawasan Asia Tenggara (Ricklefs, 2007).

### **Pengadaan Alutsista Angkatan Bersenjata Periode 1966-1969**

Perubahan arah politik dalam negeri yang terjadi pada akhir tahun 1965 hingga 1966, sangat mempengaruhi hubungan diplomasi antara Indonesia dengan negara-negara Blok Timur. Pasca peristiwa G-30S/PKI, negara-negara Blok Timur hanya sepakat untuk menanggungkan pembayaran hutang dan tidak bersedia untuk memberikan hutang baru kepada Indonesia (Marwati Djoened et al., 2008). Sebelumnya pada November 1962, Pejabat Uni Soviet di Moskwa sempat memberikan sindiran, ketika Indonesia tidak dapat membayar hutang sebesar 33 juta dolar AS (Anwar, 2007). Pada akhir September 1964, pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev, mengeluhkan macetnya pembayaran

angsuran hutang alutsista Indonesia kepada Jenderal Nasution (Nasution, 1989b).

Perubahan arah politik dalam negeri juga berdampak terhadap kesiapan alutsista ABRI. Penyebabnya adalah negara-negara Blok Timur berhenti menyediakan suku cadang alutista bagi Indonesia. Selain itu, masalah penyelesaian hutang pembayaran alutsista juga menjadi salah satu alasan negara-negara Blok Timur, terutama Uni Soviet, enggan untuk menjual suku cadang alutsista kepada Indonesia. Setelah hampir seluruh alutsista buatan Blok Timur tidak siap operasional, maka pemerintah memutuskan untuk melakukan pengadaan alutsista untuk ABRI. Pengadaan alutsista dilakukan dengan negara Blok Barat, karena kebijakan pemerintahan Indonesia yang berubah menjadi anti Komunis. Pengadaan juga ditujukan untuk menyingkirkan alutsista buatan Blok Timur. Salah satunya adalah ketika ditukarnya 5 unit pesawat MiG-19 *Farmer* AURI dengan 3 unit pesawat angkut *Lockheed L-1049 Super Constellation* milik *Pakistan International Airlines* untuk kepentingan VIP pada tahun 1969. Namun, pesawat angkut tersebut hanya beroperasi sampai tahun 1970 (Sumbodo, 2023).

Berikut adalah daftar pengadaan Alutsista untuk ABRI dari tahun 1966 hingga 1969:

**Tabel 2. Pengadaan Alutsista Angkatan Bersenjata periode 1966-1969**

Negara	Jenis Alutsista	Alutsista	Jumlah	Tahun Pembelian	Tahun Penerimaan
Australia	Pesawat Angkut Ringan	<i>Cessna</i>	17 unit	1967-1968	1969-1970

Amerika Serikat	Kapal Pendarat/LST	LST-1	2 unit	1967	1967
Inggris	Pesawat Angkut	SC.7 <i>Skyvan</i> 3M-400	3 unit	1968	1970
Pakistan	Pesawat Angkut	<i>Lockheed L-1049 Super Constellation</i>	3 unit	1969	1969
Perancis	Helikopter	SA-316B <i>Alouette III</i>	7 unit	1968	1969

### **Penggunaan Alutsista Angkatan Bersenjata Periode 1966-1969**

Penggunaan alutsista lebih digunakan untuk melakukan pemberantasan pemberontakan dan gangguan keamanan dalam negeri. Seperti menumpas gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), melakukan penumpasan sisa PKI di Blitar Selatan melalui Operasi Trisula yang dimulai 1 Juni hingga berakhir pada 7 September 1968 dan dilanjutkan operasi teritorial (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000d). Selain itu, dilakukan penumpasan terhadap anggota Pasukan Gerilya Rakyat Serawak/Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS/Paraku) yang melakukan pembangkangan. Penumpasan dilakukan melalui Operasi Tertib I pada Oktober hingga Desember 1966. Kemudian, melaksanakan Operasi Tertib II pada Januari hingga Maret 1967. Setelah Komando Mandala Siaga (Kolaga) dibubarkan, wewenang pelaksanaan operasi diserahkan kepada Kodam XII/Tanjung Pura. Kemudian, dilaksanakan operasi pembersihan yang dikenal sebagai Operasi Sapu Bersih (Saber), dilaksanakan menjadi beberapa tahap, yakni: 1. Operasi Saber I pada

April hingga Juli 1967, 2. Operasi Saber II pada Agustus 1967 hingga Februari 1969, 3. Operasi Saber III pada Maret hingga Desember 1969 (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000d).

## **KESIMPULAN**

Alutsista merupakan komponen utama bagi militer Indonesia. Sejak Perang Kemerdekaan hingga penyerahan Kedaulatan Republik Indonesia, Alutsista yang dimiliki merupakan rampasan maupun hibah dari Jepang dan Belanda. Baru memasuki pertengahan 1950-an, Indonesia baru bisa membeli Alutsista terutama dari negara-negara Eropa Barat. Penambahan kekuatan Alutsista secara besar-besaran baru terjadi setelah gagalnya perundingan diplomasi mengenai masalah Irian Barat. Dilakukan diplomasi pengadaan alutsista terhadap sejumlah negara, terutama Blok Timur dan Blok Barat. Situasi yang saat itu memasuki Perang Dingin, sangat mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam melakukan pengadaan alutsista.

Embargo penjualan alutsista yang dilakukan oleh negara Blok Barat, membuat Indonesia berpaling kepada negara Blok Timur. Kemudian pada 3 Januari 1961, terjadi sebuah pengadaan alutsista yang terbesar bagi Indonesia untuk saat itu. Pengadaan alutsista berupa puluhan kapal perang, puluhan pesawat pengangkut, puluhan pesawat tempur bertenaga pancar gas, puluhan pesawat pembom dan puluhan helikopter. Melalui pengadaan alutsista ini, membuat semakin dekatnya hubungan Indonesia dengan negara-negara Blok Timur, terutama Uni Soviet. Sehingga, seluruh kebijakan Indonesia semakin condong terhadap Blok Timur atau Blok Komunis.

Setelah dideklarasikan Trikora pada 19 Desember 1961, Indonesia melaksanakan operasi militer terbuka untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Berbagai alutsista yang didatangkan dari negara Blok Timur, sudah dipersiapkan dan perlahan beroperasi secara matang. Rencana operasi gabungan dengan sandi Operasi Jayawijaya yang melibatkan berbagai alutsista antar matra segera dilaksanakan. Tujuan dari Operasi Jayawijaya adalah pada 17 Agustus 1962, bendera Merah Putih sudah berkibar di tanah Irian Barat. Persiapan Operasi secara besar-besaran ini menjadi titik balik dari permasalahan Irian Barat. Khawatir dengan teori domino akan terjadi di Asia Tenggara dan semakin menguatnya pengaruh Komunis di Indonesia, membuat Amerika Serikat harus mengintervensi permasalahan Irian Barat. Sehingga pada 15 Agustus 1962, Amerika Serikat berhasil memaksa Belanda menandatangani perjanjian damai dengan Indonesia di New York.

Setelah pembebasan Irian Barat selesai dilaksanakan, konflik justru bergeser kepada permasalahan konfrontasi dengan negara Malaysia. Ketidaksetujuan pemerintah Indonesia terhadap dibentuk Federasi Malaysia karena dianggap sebagai sebuah bentuk Neo-kolonialisme-imperialisme (Nekolim) negara Inggris. Dilakukan banyak upaya perundingan damai dengan Malaysia maupun Filipina, namun tetap menemui jalan buntu. Sehingga pada 23 Januari 1963, ABRI memulai aksi operasi penyusupan di Kalimantan Utara. Kemudian pada 3 Mei 1964, Presiden Sukarno mengumumkan Dwikora sebagai komando dalam menghadapi Malaysia dan Inggris.

Akan tetapi, konfrontasi dengan Malaysia terlalu memakan biaya dan tenaga Indonesia. Situasi politik di dalam negeri juga semakin memanas dan inflasi terjadi secara tidak terkendali. Puncaknya terjadi peristiwa G-30S/PKI, yang membuat semakin melemahnya pemerintahan Sukarno. Untuk mengatasi keadaan, Jenderal Suharto mengambil alih kekuasaan melalui Supersemar pada 11 Maret 1966. Secara perlahan Jenderal Suharto menyingkirkan pengaruh komunis di Indonesia. Dimulai dari pembubaran PKI, menghentikan Konfrontasi dengan Malaysia hingga merenggangnya hubungan diplomatik dengan negara-negara Blok Timur.

Dengan kejadian tersebut ditambah memburuknya keadaan ekonomi, diikuti oleh besarnya hutang pengadaan alutsista dan ketidakmampuan untuk membeli suku cadang sangat mempengaruhi kesiapan alutsista ABRI. Pihak Angkatan Udara dan Angkatan Laut menjadi matra yang paling terdampak karena sebagian besar alutsista yang dimiliki merupakan buatan Blok Timur. Sehingga keadaan ini membuat ABRI harus memilih untuk menonaktifkan alutsista buatan Blok Timur. Memasuki tahun 1969 dan setelahnya, hampir seluruh alutsista buatan Blok Timur sudah tidak aktif lagi dan bernasib sebagai besi tua meski operasionalnya berumur pendek.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Surat Kabar :**

Sovjet tawarkan senjata pd Indonesia. (1958, January 18). *Merdeka*.

### **Buku :**

Anwar, R. (2007). *Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Arsana, N., & Ambar Wulan, G. (2014). *Sejarah Operasi Dwikora 1962-1966*. Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi TNI.

Cholil, M. (1979). *Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Departemen Pertahanan-Kepolisian Pusat Sejarah ABRI.

Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat. (1979). *Sejarah TNI-AD 1945-1973 Jilid 3: Peranan TNI-AD dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat.

Djamhari, S. A. (1995). *Tri Komando Rakyat Pembebasan Irian Barat (TRIKORA)*. Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.

Gottschalk, L., & Notosusanto, N. (1983). *Mengerti sejarah*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Hadiningrat, K. (1971). *Sejarah Operasi-Operasi Gabungan Dalam Rangka DWIKORA*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.

Hadinoto, S. (1988). *25 Tahun Trikora*. Jakarta: Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat.

Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wicana.

Laksmiana, E. A., Gindarsah, I., & Maharani, C. (2020). *75 Tahun TNI Evolusi Ekonomi Pertahanan, Operasi dan Organisasi Militer Indonesia: 1945-2020*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Marwati Djoened, Poesponegoro, & Nugroho Notokusanto. (2008). Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6: Zaman Jepang & Zaman Republik (4th ed.). Jakarta: Balai Pustaka.

Nasution, A. H. (1989a). Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama. Jakarta: Gunung Agung.

Nasution, A. H. (1989b). Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 6: Masa Kebangkitan Orde Baru. Jakarta: Gunung Agung.

Oktorino, N. (2018). Nusantara Membara: Operasi Dwikora - Sebuah Perang Terlupakan di Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo (Grup Kompas Gramedia).

Patiara, J., Renwari, H., Soedharto, B., & Palangan, M. (1983). Sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di daerah Irian Jaya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pour, J. (1997). Laksamana Sudomo Mengatasi Gelombang Kehidupan. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Purbaningsih, T. (2005). Sejarah Angkatan Udara Indonesia Jilid III (1960-1969). Jakarta: Dinas Penerangan Angkatan Udara.

Pusat Sejarah dan Tradisi TNI. (2000a). Sejarah TNI Jilid I (1945-1949). Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi TNI.

Pusat Sejarah dan Tradisi TNI. (2000b). Sejarah TNI Jilid II (1950-1959). Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi TNI.

Pusat Sejarah dan Tradisi TNI. (2000c). Sejarah TNI Jilid III (1960-1965). Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi TNI.

Pusat Sejarah dan Tradisi TNI. (2000d). Sejarah TNI Jilid IV (1966-1983). Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi TNI.

Ricklefs, M. C. (2007). Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Ridhani, R. (2009). Mayor Jenderal Soeharto : Panglima Komando Mandala pembebasan Irian Barat. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sumarkidjo, A. (2010). Mission Accomplished. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.

**Website :**

Adjie Nogo Seno, H. (16 September 2016). Sepenggal Kisah Jenderal Ahmad Yani Dan Bofors 40mm L/70. <https://www.indomiliter.com/sepenggal-kisah-jenderal-ahmad-yani-dan-bofors-40mm-l70/>

Departement of State (1959). FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1958–1960, INDONESIA, VOLUME XVII Document 177. <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v17/d177>

Sumbodo, S. (28 April 2023). Lockheed Constellation/Super Constellation di Indonesia. <https://aviahistoria.com/2023/04/28/lockheed-constellation-super-constellation-di-indonesia/>